

**Analisis Framing Pemberitaan Intimidasi Boyolali
di Harian Solopos Edisi 18-25 Februari 2013**

NASKAH PUBLIKASI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Guna mencapai gelar Sarjana S-1 Ilmu Komunikasi



Disusun Oleh:

DEWI KARTIKASARI

L100090047

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2013**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. A. Yani Tromol Pos 1, Pabelan, Kartasura. Telp (0271) 717417, 719483 Fax 715448 Surakarta 57102

Surat persetujuan artikel publikasi ilmiah

Yang bertanda tangan dibawah ini pembimbing skripsi/ tugas akhir :

Nama : Agus Triyono, S.Sos, M.Si

Telah membaca mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupakan ringkasan skripsi (tugas akhir) dari mahasiswa :

Nama : Dewi Kartikasari

NIM : L100090047

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Judul Skripsi : Analisis Framing Pemberitaan Intimidasi PNS Boyolali di
Harian Solopos Edisi 18-25 Februari 2013

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan. Demikian persetujuan yang dibuat, semoga dapat dipergunakan sepenuhnya.

Pembimbing

Agus Triyono, S.Sos, M.Si

**Analisis Framing Pemberitaan Intimidasi PNS Boyolali
di Harian Solopos Edisi 18-25 Februari 2013**

Dewi Kartikasari
Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Komunikasi dan Informatika
Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Penelitian ini ingin melihat bagaimana *framing* dari pemberitaan intimidasi PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali yang ada di harian Solopos selama 18-25 Februari 2013. Penelitian ini menarik karena pada dasarnya PNS adalah pegawai pemerintah yang harus netral, bebas dari pengaruh suatu golongan dan tidak boleh terlibat politik praktis. Namun dalam praktiknya, Solopos menemui pelanggaran tersebut terjadi di Boyolali. PNS secara rutin dikumpulkan dalam acara bertajuk “*sillaturahmi* PNS” dengan pembicara Sekda Boyolali dan Seno Kusumoharjo (kakak Bupati Boyolali) dengan isi ceramah mengandung muatan intimidasi. Pemilihan media cetak Solopos dilakukan berdasarkan pertimbangan Solopos merupakan koran lokal satu-satunya yang mengangkat dan mengulas permasalahan ini secara terus menerus. Sedangkan untuk melihat *frame* yang dibentuk Solopos, peneliti menggunakan analisis *framing* model Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki. Hasil dari penelitian ini adalah intimidasi PNS Boyolali terjadi karena adanya politik kekuasaan. Terdapat tiga temuan peneliti dalam peristiwa ini, yaitu intimidasi dan politisasi PNS dilakukan untuk mendapatkan kekuasaan, terjadinya marginalisasi Korpri dalam lingkaran politik kekuasaan, dan adanya *central figure* dalam pemerintahan Kabupaten Boyolali.

Kata Kunci :

Intimidasi PNS Boyolali, *framing*, Solopos

Latar Belakang

Lahirnya kebebasan pers di Indonesia menjadikan pers kemudian berkembang menjadi agen kontrol pemerintah. Ada masa suram yang pernah dihadapi ketika masa pemerintahan Presiden Soeharto. Kala itu, pers dihadapkan pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru yang membatasi gerak pers. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan pencabutan Surat Izin Terbit dan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) bagi surat kabar yang dianggap ‘nakal’ dalam memberitakan pemerintahan (Ardianto, 2005 : 103-104).

Kini, kemerdekaan pers telah terjamin dan tertuang dalam UU No. 4/99 tentang pers (UU Pers). Untuk menjalankan fungsinya, pers mendapatkan perlindungan dari pasal ini, tepatnya pasal 4 ayat 2 yang menjelaskan bahwa terhadap pers

nasional tidak diberlakukan penyensoran, pembredelan dan pelarangan penyiaran (Maulana, 2011 : 30).

Hal ini sebagaimana yang dilakukan Solopos. Sebagai media cetak lokal, Solopos kemudian melakukan fungsinya, yaitu mengkritisi peristiwa intimidasi PNS yang terjadi di Boyolali melalui pemberitaannya secara intensif menaayangkannya selama tanggal 18 hingga 25 Februari 2013.

PNS sejatinya adalah pegawai pemerintahnya yang seharusnya bebas dari tekanan ataupun pengaruh suatu golongan, sehingga bisa tetap mengedepankan netralitasnya. Namun fakta yang ada di lapangan (Boyolali), malah sebaliknya.

Pemberitaan ini muncul karena adanya pertemuan yang bertajuk “silaturahmi PNS” yang dilakukan di beberapa tempat, seperti Panti Marhaen (kantor DPC PDIP Boyolali), gedung

SMAN 1 Boyolali, kantor kecamatan, hingga kantor kelurahan. Selain itu, dalam acara tersebut hadir pula Sekda Boyolali (Sri Ardiningsih) serta Seno Kusumoharjo (kakak Bupati Boyolali). suara di DPRD Boyolali pun terpecah dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Berdasarkan pemberitaan tersebut, di sini penulis ingin mengetahui bagaimana Solopos melakukan konstruk dalam peristiwa intimidasi PNS Boyolali. Pemilihan Solopos dikarenakan Solopos merupakan koran lokal yang terbesar dan masih eksis untuk tetap bertahan di Solo dan sekitarnya. Selain itu, juga karena hanya Soloposlah yang mengulas mengenai permasalahan ini.

Solopos hadir di masyarakat pada tahun 1997 dengan pemimpin umum Prof. Dr. Sukamdani S. Gitosardjono. Tampilan Solopos terbit dengan 24 halaman dan dibagi dalam dua seksi.

Seksi pertama berisi halaman muka, umum, Jateng & DIY, Gagasan, Inspirasi, Pendidikan, Ekonomi & Bisnis, Internasional, Pagelaran, Olah raga dan Sepak bola. Sedangkan seksi kedua, berisi Soloraya, Kota Solo, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Sragen, Boyolali, Karanganyar, Umum & Kriminalitas, Iklan Cespleng dan Satelit Solo.

Penulis memilih untuk meneliti permasalahan ini karena pemberitaan mengenai peristiwa ini menarik untuk diteliti, menyangkut masalah berlangsungnya suatu pemerintahan. Di mana, dari pemberitaan Solopos kita mengetahui ada kesenjangan antara apa yang “seharusnya terjadi” dan “tidak terjadi” pada PNS di Boyolali.

Guna mempertajam penelitian, maka peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya. Penelitian tersebut adalah skripsi dari

Gema Mawardi yang berjudul “Pembingkaian Berita Media Online (Analisis *Framing* Berita Mundurnya Surya Paloh dari Partai Golkar di mediaindonesia.com dan vivanews.com Tanggal 7 September 2011”. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, tahun 2012.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana *framing* pemberitaan yang dilakukan oleh media dalam menyampaikan sebuah peristiwa dan untuk mendapatkan gambaran sampai sejauh mana pengaruh ideologi dan politik ekonomi media terhadap upaya untuk mendekati objektivitas dan posisi netral dalam pemberitaan. Analisis *framing* dilakukan dengan model analisis Pan dan Kosicki.

Diferensiasi dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada obyek kajiannya. Jika penelitian sebelumnya

menggunakan obyek kajian yang berhubungan dengan politik dan kepartaian, maka dalam penelitian ini menggunakan obyek penelitian yang berkaitan dengan Pemerintahan. Selain itu, penelitian ini menggunakan satu surat kabar saja, yaitu Solopos.

A. Tinjauan Pustaka

Media *massa*, termasuk media cetak, media elektronik maupun media online merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan komunikasi massa. Ciri-ciri dari komunikasi massa antara lain : *audiencenya* besar dan tersebar, pesan bersifat umum dan komunikatornya merupakan suatu organisasi yang kompleks (Tamburaka, 2012 : 15).

Komunikasi *massa* juga merupakan kegiatan yang berkaitan dengan jurnalistik. Menurut Onong Uchjana Effendi dalam Suryawati, jurnalistik memiliki memiliki empat fungsi, yaitu

to inform, to educate, to entertain dan *to influence* (Suryawati, 2011 : 38-39).

Dalam melakukan kegiatan jurnalistik, wartawan kemudian melakukan konstruksi terhadap fakta yang ia temui di lapangan untuk kemudian disampaikan ke *audience* melalui media.

Ada pandangan penting mengenai media. Pandangan ini berasal dari paham konstruksionis. Paham ini menganggap media tidak hanya sebagai saluran saja, tapi sebagai agen yang melakukan konstruksi terhadap suatu realitas berdasarkan unsur-unsur tertentu yang meliputi media itu (Eriyanto, 2002 : 22-23). Tiap media memiliki unsur yang berbeda-beda, sehingga konstruk yang dihasilkan media satu dan yang lainnya berbeda pula. Hal ini bisa juga termasuk kepentingan internal media.

Media *massa* tidak bisa menyampaikan keseluruhan peristiwa

yang terjadi dengan detail dalam berita. Hal ini kemudian mempengaruhi wacana yang dibentuk oleh media *massa*. Fakta-fakta yang ada kemudian ada yang ditonjolkan dan ada yang disembunyikan, tergantung dari kepentingan dan kebijakan media *massa*. Selain itu, mengutip dalam bukunya Van Dijk dalam Hamad, *framing* bisa digunakan sebagai teori maupun sebagai metode yang dapat digunakan untuk membedah suatu wacana (Hamad, 2004 : 21-22).

Kemampuan media dalam mengkonstruksi suatu realita inilah yang kemudian membuat pemerintah harus mampu menjaga hubungan baik dengan media *massa*. Hal ini disebabkan karena media *massa* sering menyoroiti mengenai masalah pemerintahan dan politik. Maka pemerintah perlu menjaga hubungan dengan media *massa* agar citra dan reputasi pemerintah di mata publik tetap terjaga (Iriantara, 2008 : 4).

Mengutip dari Littlejohn dan Foss dalam Morissan, menjelaskan ada empat tipe yang menggambarkan hubungan pemerintah, yaitu (Morissan, 2010 ; 48-49) :

1. *High-power source, high-power media* : Antara pemerintah dan media sama-sama memiliki kekuatan yang besar. Jika menjalin kerjasama yang baik, bisa memberikan pengaruh yang besar pada agenda publik.
2. *High-power source, low-power media* : Media memiliki kekuatan yang lebih rendah dari pemerintah. Dalam praktiknya di suatu pemerintahan jika terjadi tipe ini, maka media akan digunakan untuk mencapai tujuannya.
3. *Low-power source, high-power media* : Kekutan media lebih besar, sehingga bebas untuk menentukan agendanya sendiri, serta dapat pula memberitakan, menambah ataupun

mengurangi intensitas pemberitaan tertentu, terhadap suatu peristiwa.

4. *Low-power source, low-power media* : Dalam tipe ini, agenda media ditentukan oleh peristiwa itu sendiri, bukan dari media ataupun pemerintah.

Sebelumnya telah disebutkan bahwa *framing* bisa digunakan sebagai teori maupun sebagai metode analisis. *Framing* sebagai teori dapat dilihat dalam dua tradisi. Pertama dimensi psikologis yang mengungkap jika pesan atau realitas dibentuk melalui kerangka berpikir dan digambarkan dengan cara tertentu guna menyederhanakan suatu realitas. Proses pembuatan pesan inilah, yang membuat suatu realitas memiliki bingkai, perspektif atau dimensi tertentu, (Eriyanto, 2002 : 72-79).

Kedua, dimensi sosiologis yang menganggap *frame* media membuat realitas kehidupan sehari-hari dan

mentransformasikannya dalam bentuk cerita, yang memungkinkan seseorang untuk mengorganisasikan pengalamannya guna memahami suatu peristiwa serta memaknai dan mengidentifikasikannya (Eriyanto, 2002 : 79-82). Tokoh dari dimensi sosiologis ini antara lain ada Erving Goffman dan Peter L. Berger.

Mengutip dari Eriyanto, teori dari Berger menganggap realitas dibentuk dan dikonstruksi, jadi bukan dibentuk secara ilmiah. Hal ini menyebabkan setiap orang bisa memiliki konstruk yang berbeda-beda terhadap suatu realitas (Eriyanto, 2002 : 15).

Sedangkan pandangan kedua adalah dari Erving Goffman. Ia berpendapat setiap manusia akan mengklasifikasikan dan mengorganisasikan kegiatan peristiwa di kesehariannya, kemudian menjadikan hal tersebut sebagai realitas setelah melalui tahap pendefinisian situasi. Hal

ini kemudian akan mempengaruhi *frame* seseorang terhadap realitas sosial (Eriyanto, 2002 : 81).

Dalam penelitian ini menerapkan model dari Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki yang berpegang pada struktur, yaitu sintaksis, skrip, tematik dan retorik.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena sifat penelitian ini bukan untuk menguji teori. Tapi, penelitian ini dilakukan hanya untuk menggambarkan mengenai suatu fenomena yang terjadi.

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer yang berasal dari harian Solopos edisi 18-25 Februari 2013 yang berkaitan dengan pemberitaan intimidasi PNS Boyolali. Peneliti memilih menggunakan surat kabar ini karena hanya Solopos yang mengangkat dan mengulas mengenai permasalahan ini secara mendalam.

Sedangkan surat kabar lainnya tidak. Data yang kedua adalah data sekunder. Data ini diperoleh peneliti melalui studi pustaka dengan mempelajari buku-buku, artikel maupun dari berbagai situs diinternet yang relevan dan mampu menunjang penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama studi dokumentasi dan studi pustaka. Studi dokumentasi dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data ataupun informasi dari Solopos edisi 18-25 Februari 2013 yang berkaitan dengan kajian yang diteliti. Sedangkan studi pustaka dilakukan dengan mencari data-data maupun teori relevan lainnya yang bersumber dari buku maupun sumber lainnya yang dapat mendukung penelitian. Berikut unit analisis data yang digunakan dalam penelitian :

Tgl	Judul Artikel	Hal
18/2/2013	PNS Boyolali Diintimidasi	1 dan 8 kolom 1
	Wajah Orde Baru di Birokrasi	5
	PNS Waswas “Baperjakat Jalanan”	5
	Kekuasaan Mandulkan Korpri	5
19/2/2013	Wabub : PNS Jangan Takut Ditekan	1 dan 8 kolom 1
20/2/2013	“Seno Jangan Asal Gusur”	1 dan 8 kolom 1
21/2/2013	PNS Dipolitisasi, DPRD Boyolali Diminta Panggil Bupati	1 dan 8 kolom 4
23/2/2013	Soal Politisasi PNS, Komisi 1 Diminta Jemput Bola	VII
25/2/2013	Seno : Saya Yang Paling Tahu Boyolali	1 dan 8 kolom 4
	Soal Pemanggilan Seno Kusumo, Pimpinan DPRD Terbelah	VII

Teknik analisis yang digunakan adalah Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki. Dengan perangkat *framing* tersebut, peneliti kemudian mempelajari data yang diperoleh dan mendapati tiga tema

pokok bahasan yang peneliti anggap sebagai aspek secara umum yang berusaha dimunculkan Solopos.

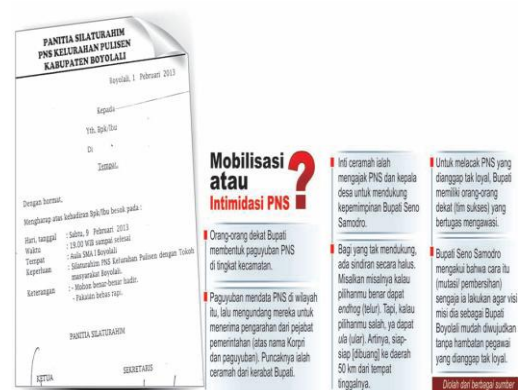
C. Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan dari harian Solopos mengenai pemberitaan intimidasi PNS Boyolali, dengan menggunakan analisis *framing* model Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki yang memperhatikan struktur sintaksis (cara wartawan menyusun fakta), skrip (cara wartawan mengisahkan fakta), tematik (cara wartawan dalam menulis fakta) dan retorik (cara dalam penekanan fakta), peneliti menemukan bahwa :

1. Intimidasi dan Politisasi PNS di Kabupaten Boyolali

Dalam sintaksis terkait tema pertama, Solopos menarik perhatian pembaca pada edisi 18 Februari 2013 dengan *headline* “PNS Boyolali Diintimidasi” yang mengisahkan bahwa ada acara pengumpulan PNS,

namun beberapa pihak menganggap ini sebagai bentuk mobilisasi dan intimidasi PNS karena isi ceramah dari Sekda Boyolali dan kakak Bupati Boyolali. Aspek menonjol berikutnya yaitu pada struktur retorik, tepatnya pada grafis yang digunakan pada *Headline* (18/2/2013, halaman 1) :



Serta grafis pada tanggal yang di halaman 5 pada laporan khusus. Di mana dalam grafis tersebut divisualisasikan sebagai mainan.



2. Marginalisasi Korpri dalam Lingkaran Politik Kekuasaan

Tema Korpri Boyolali mulai terpinggirkan digunakan peneliti dengan melihat artikel pemberitaan berkaitan dengan Korpri di Solopos (18/2/2013) halaman 5, dengan judul “Kekuasaan Mandulkan Korpri”.

Kritik tajam tertuju pada ketua Korpri (Sekda Boyolali, sri Ardiningsi) terkait dengan keikutsertaannya dalam acara pengumpulan PNS. Peneliti menemukan kutipan dari Basuni, ketua fraksi PKS dalam Solopos (23/2/2013, halaman VII). Ia menganggap bahwa Sekda selaku ketua Korpri tidak melindungi anggotanya, dan membawa PNS ke ranah politik.

Peran Korpri Boyolali tersaingi dengan peguyuban-paguyuban PNS yang lebih sering mengadakan acara pengumpulan PNS. Hal ini ditandai

dengan latar Solopos yang menegaskan keberadaan paguyuban PNS di Boyolali.

Kalangan wakil rakyat meminta paguyuban itu ditiadakan karena organisasi PNS sudah diwadahi dalam Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) (Solopos, 21/2/2013, halaman 8 kol 4).

3. *Central Figure* dalam Pemerintahan Kabupaten Boyolali

Central figure yang dimaksud oleh peneliti adalah Seno Kusumoharjo (kakak Bupati Boyolali sekaligus elite PDIP), karena walaupun ia bukan dari golongan struktural, tetapi ia memiliki peranan yang cukup dominan dalam pemerintahan.

Dari sintaksis, khususnya kutipan langsung Bupati Boyolali, semakin memperkuat tema ketiga ini, yaitu Seno Kusumoharjo merupakan *central figure* dalam pemerintahan Boyolali.

“Kakak saya mau disalahkan apa? Kedudukannya sebagai

tokoh masyarakat. Apa bupati bisa melarang? Mereka bebas berpendapat. Bagi saya, dia (kakak, Seno Kusumoharjo) kan hero (pahlawan). Sapa sing mbayari menang bupati? (siapa yang mendanai hingga saya menang menjadi bupati),” kata Seno (Solopos, 25/2/2013, halaman 8 kol 4).

Jelas dari kutipan tersebut Seno Kusumoharjopun juga menganggap sang kakak memiliki andil dalam terpilihnya ia menjadi bupati. Sehingga seakan ia tidak bisa bertindak secara obyektif mengenai kehadiran Seno Kusumoharjo dalam acara pengumpulan PNS, ia tidak bisa menghentikan.

Bupati Seno mengaku tidak bisa menghentikan langkah kakanya, Seno Kusumoharjo, memberikan pidato disejumlah forum termasuk yang dihadiri sejumlah PNS (Solopos, 25/2/2013, halaman 8 kol 4).

Pemberitaan perkembangan kasus ini seperti mengambang, ini dapat kita lihat dari Solopos (25/2/2013, halaman VII), Solopos mengangkat judul “Soal Pemanggilan Seno Kusumo, Pimpinan DPRD

Terbelah”. Artikel tersebut juga menjadi artikel terakhir yang peneliti temui terkait kasus ini.

Adanya kurang berimbangan narasumber dari pemberitaan ini, khususnya tema ketiga ini. Faktanya, banyak kalangan seperti DPRD, Bupati Boyolali, orang di luar birokrasi (seperti Bramastya) dan para pengamat politik dan pemerintahan memberikan pendapat dan pandangan terkait keterlibatan Seno Kusumoharjo. Namun yang kemudian yang peneliti dapati dari memahami rangkaian pemberitaan ini, tidak ada pernyataan ataupun pendapat langsung dari Seno Kusumoharjo terkait keterlibatannya yang ditulis Solopos.

D. Kesimpulan

1. Solopos melakukan komunikasi *massa* karena memenuhi ciri-cirinya, yaitu menyebar luaskan informasi, khususnya terkait

intimidasi PNS Boyolali, sehingga publik tahu peristiwa yang dialami PNS Boyolali.

2. Adanya ketidakberimbangan narasumber yang dilakukan ketika menghimpun fakta. Hal ini terlihat dengan tidak adanya komentar atau pendapat langsung dari Seno Kusumoharjo di artikel Solopos, padahal ia bisa dikatakan sebagai aktor penting dalam pemberitaan ini.
3. Tipe hubungan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dan Solopos adalah tipe *Low-power source, high-power media*. Solopos bebas menentukan agendanya sendiri. Serta dapat pula memberitakan, menambah ataupun mengurangi intensitas pemberitaan tertentu, terhadap suatu peristiwa. Ini terlihat dengan intensitas penayangan pemberitaan yang terkait kasus intimidasi PNS

Boyolali yang tetap ditampilkan dan dibahas hingga lima hari.

4. Solopos merupakan agen konstruksi realitas (menganut paham konstruksionis) dan berada di dimensi sosiologis, karena sebagai organisasi kompleks yang memiliki kebijakan tersendiri.

E. SARAN

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan menganalisis dan menerapkan model analisis maupun teori dari tokoh yang berbeda, misalnya melakukan analisis dengan analisis wacana ataupun analisis isi. Selain itu, besar harapan peneliti agar Solopos tetap mampu menjaga kenetralannya sebagai media massa, dengan memperhatikan keberimbangan dalam pemilihan narasumber.

Selanjutnya, untuk khalayak atau pembaca, perlu diketahui bahwa apa yang disajikan oleh media *massa*, sebenarnya telah melalui proses kontruksi dan pembingkaian. Maka, ketika khalayak memperoleh informasi dari media, hendaknya bersikap kritis.

F. PERSANTUNAN

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu memberikan bimbingan, bantuan, dan dukungan. Ucapan terima kasih secara khusus penulis berikan kepada :

Bapak M.Toharuddin, S.pd, MA dan bapak Agus Triyono, S.Sos, M.Si, terimakasih atas kesediaannya selama ini dalam membimbing penulis dalam pembuatan skripsi.

Terima kasih juga bapak, ibu dan kakak-kakakku atas do'a, kasih sayang dan dukungan yang tiada henti pada penulis dalam menyelesaikan studi, teri

ma kasih telah menjadi penyemangat, motivator dan inspirasi bagi penulis. Terima kasih juga untuk teman-teman, atas kebersamaannya selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Ardianto, Elvinaro dan Lukiati Komala Erdinaya. 2005. *Komunikasi Massa : Suatu Pengantar*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Hamad, Ibnu. 2010. *Komunikasi Sebagai Wacana*. Jakarta : La Tofi Enterprise.
- Iriantara, Yosol. 2008. *Media Relation Konsep, Pendekatan dan Praktik*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. 2006. *Jurnalistik : Teori dan Praktik*. Bandung : PT remaja Rosdakarya.
- Maulana, Indra. 2011. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjalanan Kemerdekaan Pers dan Saran Optimalisasi Pemajuan Pers di Indonesia*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Morissan. 2010. *Teori Komunikasi Massa*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Suryawati, Indah. 2011. *Jurnalistik Suatu Pengantar Teori & Praktik*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Tamburaka, Arpiadi. 2012. *Agenda seting Media Massa*. Jakarta : Rajawali Pers.

Sumber Penelitian :

- Mawardi, Gema. 2012. *Pembingkasaan Berita Media Online (Analisis Framing Berita Mundurnya Surya Paloh dari Partai Golkar di mediaindonesia.com dan vivanews.com Tanggal 7 September 2011)*. Skripsi pada Program Ilmu Komunikasi Fakultas Sosial dan Politik UI. Depok : Dipublikasikan.

Sumber Surat Kabar :

- Solopos. Senin, 18 Februari 2013. *PNS Boyolali Diintimidasi*.
- _____. Kamis, 21 Februari 2013. *PNS Dipolitisasi, DPRD Boyolali Diminta Panggil Bupati*.
- _____. Sabtu, 23 Februari 2013. *Soal Politisasi PNS, Komisi 1 Diminta Jemput Bola*.
- _____. Senin, 25 Februari 2013. *Seno : Saya Yang Paling Tahu Boyolali*.